

**STRATEGI KAMPANYE PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI,
PERCERAIAN, DAN PERURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI
OLEH PEMERINTAH KECAMATAN SAPTOSARI TAHUN 2015-2016
KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh :

Farisya Yuni

20140530277

**Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

2018

HALAMAN PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi dengan Judul :

**STRATEGI KAMPANYE PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI,
PERCERAIAN, DAN PERURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI
OLEH PEMERINTAH KECAMATAN SAPTOSARI TAHUN 2015-2016
KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh :

Farisya Yuni

20140530277

Yang Disetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Suciati, S.Sos., M.Si
NIP. 19720413199702 163 054



**PERCERAIAN, DAN PERURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI
OLEH PEMERINTAH KECAMATAN SAPTOSARI TAHUN 2015-2016
KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Farisya Yuni

farisyayuni@gmail.com

Abstrak :

Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai strategi kampanye pemerintah kecamatan Saptosari dalam mencegah pernikahan dini, perceraian, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Peneliti memilih pemerintah kecamatan Saptosari karena keberhasilan mereka dalam menurunkan kasus pernikahan dini hingga menjadi nol kasus pada tahun 2016. Strategi kampanye mereka kemudian menjadi contoh BPPM DIY untuk melakukan kampanye pendewasaan usia pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali lebih dalam bagaimana strategi kampanye yang dilakukan pemerintah kecamatan Saptosari sehingga dapat menurunkan angka pernikahan dini, perceraian, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data model Miles dan Huberman, dimana nantinya terdapat pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kampanye yang dilakukan pemerintah kecamatan Saptosari telah berhasil menurunkan angka pernikahan dini, perceraian, serta angka kematian ibu dan bayi. Strategi kampanye yang dilakukan diantaranya adalah deklarasi stop pernikahan dini, sosialisasi dan edukasi masyarakat, hingga pembatasan dispensasi pernikahan.

Kata Kunci : Strategi Kampanye, Pernikahan Dini, Deklarasi, dan Edukasi

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan

kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Berbagai persoalan dapat muncul jika keluarga tidak memiliki ketahanan, mulai dari tidak tercukupinya ekonomi keluarga, kesehatan, hingga keharmonisan keluarga. Beberapa hal memicu sulitnya menciptakan ketahanan keluarga, diantaranya adalah ketidaksiapan pasangan dalam membangun rumah tangga atau keluarga tersebut. Ketidaksiapan ini salah satunya dapat diakibatkan karena terjadinya pernikahan yang tidak diinginkan ataupun pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mencukupi usia yang dibatasi oleh undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan menjelaskan tentang definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun.

Pernikahan dini bukan hanya fenomena terjadinya pernikahan anak dibawah umur, namun juga memiliki banyak akibat yang dapat ditimbulkan, diantaranya kemiskinan, angka persalinan ibu dibawah umur yang tinggi, kematian bayi, kematian ibu, kekerasan dalam rumah tangga, hingga dapat berujung pada perceraian karena tidak mampu dalam membangun ketahanan keluarga. Salah satu bahaya tingginya angka persalinan di bawah umur dikarenakan saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonate (*kematian* bayi yang lahir hidup dalam rentang waktu 28 hari sejak kelahiran) (<https://saripediatri.org/index.php/saripediatri/article/view/607/542> diakses pada 29 september 2017)

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, kasus pernikahan dini masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian pemerintah. Pada tahun 2014 data yang diperoleh BPPM DIY, pernikahan dini yang terjadi di kalangan remaja mencapai 482 kasus, angka persalinan pada remaja mencapai 1082 kasus, hingga kehamilan yang tak diinginkan mencapai 976 kasus. Di DIY, kasus pernikahan dini paling banyak terjadi di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 11,29 persen, diikuti Kota Yogyakarta 7,79 persen, Bantul 7,30 persen, Kulonprogo 7,28 persen, dan Sleman 5,07 persen. (<http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa/4KZVgwpK-indonesia-kamboja-penyumbang-tertinggi-pernikahan-dini> diakses pada 26 Oktober 2017).

Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Gunung Kidul ini erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Warga berpikir bahwa dengan menikahkan anak mereka, maka beban atau tanggungan ekonomi keluarga akan berkurang. Padahal pemikiran ini tentu keliru. Jika anak yang dinikahkan belum cukup umur dan belum mampu memikul tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maka ini dapat menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Angka kemiskinan bukannya berkurang justru malah akan bertambah. Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Dr. Umi Listyaningsih, M.Si. mengingatkan bahwa kemiskinan sebetulnya bukan menjadi faktor utama yang mempengaruhi terjadinya PUD (Pernikahan Usia Dini). Tingkat partisipasi pendidikan yang rendah dan budaya menjadi faktor lain yang perlu untuk diperhatikan pula. Beberapa remaja di Gunungkidul misalnya, melakukan PUD bukan karena telah hamil di luar nikah.

Diantara 18 kecamatan yang ada di Gunung Kidul, terdapat 2 kecamatan yang berhasil menurunkan angka pernikahan dini dengan signifikan. Kecamatan Saptosari merupakan salah satu kecamatan yang berhasil mengatasi masalah pernikahan dini hingga turun menjadi 0 kasus. Keberhasilan dalam menanggulangi pernikahan dini ini ternyata dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di Saptosari. Berdasarkan wawancara dengan Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP, MSi. Menjelaskan bahwa tahun 2013, kecamatan Saptosari merupakan kecamatan yang paling miskin

diantara 18 kecamatan yang ada di Gunung Kidul. Kemiskinan tersebut menimbulkan banyak masalah lain diantaranya gizi buruk dan angka kematian bayi tinggi. Pernikahan dini juga mengakibatkan mengapa angka kemiskinan di Saptosari tinggi. Hal ini dikarenakan anak-anak yang baru menikah dan belum memiliki pekerjaan akan menambah KK (Kartu Keluarga) miskin yang baru.

Berdasarkan keberhasilan Kecamatan Saptosari tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana strategi kampanye kecamatan Saptosari dalam menanggulangi kasus pernikahan dini hingga dapat berhasil menurunkan angka pernikahan dini menjadi nol persen serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana strategi kampanye pencegahan pernikahan dini, perceraian, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi oleh pemerintah kecamatan Saptosari kabupaten Gunung Kidul?

Kajian Teori

1. Strategi Kampanye

Menurut Venus (2012:152), Strategi kampanye merupakan pendekatan secara keseluruhan yang akan diterapkan dalam kampanye, atau lebih mudahnya dapat disebut sebagai *guiding principle*, atau *the big idea*. *Guiding principle* atau *the big idea* ini dapat diartikan sebagai pendekatan yang diambil untuk menuju pada suatu kondisi tertentu dari posisi saat ini, yang dibuat berdasarkan analisis masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi kampanye sendiri terdiri dari perencanaan kampanye, pelaksanaan kampanye, serta evaluasi kampanye.

2. Perencanaan Kampanye

Alo Liliweri (2011:688) menyatakan terdapat 8 tahapan dalam menyusun perencanaan kampanye atau yang sering disebut strategi kampanye. Tahapan-tahapan tersebut adalah Analisa Masalah, Tujuan dan Sasaran, Menentukan Stakeholder, Menentukan Pesan, Taktik, Menentukan Messenger (Pemesan), Sumber daya, dan *Assessment*

3. Pelaksanaan Kampanye

Venus (2012:199) menjelaskan pelaksanaan kampanye adalah penerapan dari konstruksi rancangan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena sifatnya yang demikian maka proses pelaksanaan harus secara konsisten berpedoman kepada rancangan yang ada tanpa mengabaikan penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kenyataan lapangan yang dihadapi. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap pelaksanaan meliputi : realisasi unsur – unsur pokok kampanye, menguji coba rencana kampanye, pemantauan pelaksanaan, dan pembuatan laporan kemajuan.

4. Evaluasi Kampanye

Evaluasi adalah komponen terakhir dari rangkaian proses pengelolaan kampanye. Evaluasi kampanye diartikan sebagai upaya sistematis untuk menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan kampanye. Dari definisi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi kampanye tidak hanya dilakukan saat kampanye telah berakhir, namun juga ketika kampanye tersebut masih berlangsung. (Venus, 2012:209-210). Evaluasi kampanye merupakan kegiatan untuk memeriksa kembali apakah “segala sesuatu” yang telah dilaksanakan atau yang diimplementasikan itu sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya (Liliweri, 2011:729).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara tak terstruktur

dan studi dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Pembahasan

1. Analisis Masalah

Langkah awal analisis masalah yang ditemukan merupakan diskusi informal atau hanya sekedar percakapan antara pemimpin lembaga kedinasan disana yaitu Camat Saptosari, Kepala KUA, serta Kepala Puskesmas. Pembicaraan berawal dengan memaparkan masalah-masalah yang dihadapi seputar jangkauan pekerjaan masing-masing. Camat membicarakan masalah sosial ekonomi masyarakat yang masih di garis kemiskinan, Kepala Puskesmas membicarakan masalah kesehatan ibu dan bayi serta kekurangan gizi, dan Kepala KUA membicarakan tingginya angka dispensasi pernikahan serta perceraian. Melalui perbincangan para pemimpin instansi tersebut, diketahuilah bahwa kasus-kasus tersebut berkaitan dengan masalah pernikahan dini. Selain itu, pemerintah kecamatan Saptosari juga membahas atau menganalisis masalah dengan cara diskusi melalui pengajian bulanan yang diikuti oleh para pegawai dinas yang bekerja di Saptosari. Dalam pengajian tersebut seringkali membahas mengenai masalah yang terjadi dalam lingkup kecamatan Saptosari, salah satunya juga membahas mengenai masalah pernikahan dini tersebut. Langkah pemerintah dalam menganalisis masalah pada awalnya tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Cutlip,dkk (2011:335) berkaitan dengan metode informal. Metode informal sendiri masih mendominasi riset PR, meskipun metode ilmiah yang sudah maju sudah tersedia. Tetapi metode informal dapat berguna, jika praktisi mengakui kelemahan dan tujuannya.

2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mengatasi masalah pernikahan dini tersebut, Pemerintah kecamatan Saptosari melakukan strategi kampanye dengan tujuan yaitu meniadakan terjadinya pernikahan dini sehingga diharapkan kasus perceraian serta kematian ibu dan bayi juga dapat menurun. Tujuan tersebut berada pada tingkat perubahan perilaku (*behavior*).

3. Menetapkan Sasaran dan Stakeholder

Sasaran yang dituju oleh pemerintah Saptosari adalah seluruh elemen masyarakat, dimana kampanye dilakukan dengan melibatkan instansi pemerintah, sekolah, para perangkat desa, dan masyarakat. Menurut Venus (2012:149) dengan melakukan identifikasi dan segmentasi sasaran maka proses perencanaan selanjutnya akan lebih mudah, hingga akhirnya akan melancarkan pelaksanaan kampanye. Untuk mempermudah proses identifikasi dan segmentasi sasaran perlu dilakukan pelapisan sasaran, yaitu sasaran utama, sasaran lapis satu, sasaran lapis dua dan seterusnya sesuai tujuan kampanye. Kampanye dilakukan dengan cara sosialisasi, edukasi, dan deklarasi. Deklarasi merupakan kegiatan dimana para peserta deklarasi dikumpulkan pada suatu acara dengan mengucapkan bersama-sama kalimat yang berisikan komitmen menghentikan pernikahan dini. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan setelah deklarasi diucapkan. Pada tahap awal deklarasi dilakukan di kantor Kecamatan saptosari dihadiri oleh Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Kapolsek, Koramil, Seluruh Kepala Desa, Kepala Sekolah, hingga Tokoh Agama. Kemudian deklarasi kembali di lanjutkan di tingkat Desa dipimpin oleh Kepala Desa dengan melibatkan Dukuh, Ketua RW, Ketua RT.

4. Menentukan Pesan

Langkah berikutnya yang dilakukan adalah menentukan pesan. Pesan kampanye yang efektif adalah pesan yang menginformasikan dengan segera kejadian penting yang sedang terjadi di sekitar khalayak sasarannya, sehingga mudah dikenal dan ditanggapi oleh khalayak, Venus (2012:80). Dalam melaksanakan kampanye

pengecahan pernikahan dini, pemerintah kecamatan Saptosari atau yang tergabung dalam panitia kampanye menyiapkan 5 pesan utama yang akan disampaikan atau disosialisasikan. Dalam pesan tersebut berisikan bahwa pernikahan dini dapat mengakibatkan cita-cita orang tua dan anak hilang, memunculkan KK miskin baru, mengakibatkan ibu dan bayi tidak sehat, memunculkan kualitas bayi rendah, serta sebagian besar pernikahan berakhir dengan perceraian. Pesan-pesan tersebutlah yang dikampanyekan oleh para komunikator yang telah ditentukan tim kampanye.

5. Taktik

Pelaksanaan kampanye pencegahan pernikahan dini dilakukan oleh tim kampanye dengan beberapa taktik. Taktik yang dilakukan adalah Camat Saptosari membentuk kerjasama antara Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Kepala Desa dan Lurah, untuk tidak membiarkan pernikahan dini terjadi kembali dengan cara tidak akan memberikan surat pengantar kelurahan untuk menikah. Sehingga langkah masyarakat yang ingin menikah dini ke KUA akan gagal jika Lurah tidak mau memberikan surat pengantar ke KUA. Jika pasangan bersikeras untuk tetap menikah, maka KUA akan melaporkan ke Camat, sehingga pasangan tersebut akan dipanggil ke kantor kecamatan dan diberikan nasihat mengenai pernikahan dini beserta penjelasan hukum yang berlaku mengenai menikah di bawah umur oleh Camat, Kapolsek, dan Kepala Puskesmas. Meskipun taktik demikian telah dilakukan, masih terdapat beberapa masyarakat yang tetap ingin menikah atau menikahkan anaknya yang masih belia dengan beralasan telah hamil, maka tim kampanye masih menjalankan taktik yang lain. Pemeriksaan kehamilan merupakan suatu keharusan sehingga dapat terlihat apakah hanya alasan atau memang terjadi kehamilan. Jika ternyata diketahui tidak hamil, maka Kapolsek akan turun tangan menjelaskan ancaman hukum yang berlaku jika menghamili anak di bawah umur, sehingga mereka tidak jadi melakukan pernikahan dini. Namun jika kehamilan memang sudah terjadi, maka mereka dengan terpaksa diijinkan menikah dengan syarat harus mendapatkan surat putusan dari

pengadilan agama. Hal ini dikarenakan anak yang dikandung harus dipertanggungjawabkan.

Taktik berikutnya yaitu sosialisai dan edukasi yang dilakukan dengan membuat forum anak dan kelas remaja, kelas ayah dan kelas ibu. Kelas remaja merupakan edukasi mengenai kegiatan remaja yang positif. Selain itu diberikan pula materi mengenai kesehatan reproduksi, bagaimana bersikap terhadap lawan jenis, serta pandangan mengenai pernikahan. Dengan adanya edukasi untuk mengalihkan kegiatan remaja ke hal yang positif serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai pernikahan, para remaja dapat menentukan sikap untuk menolak pernikahan dini serta ingin melanjutkan cita-cita mereka. Kemudian terdapat pula forum perempuan serta kelas ayah dan kelas ibu. Dalam forum dan kelas tersebut berisikan tentang edukasi mengenai peran dalam keluarga, bagaimana mendidik dan berkomunikasi dengan anak, bagaimana berbagi peran antara suami dan istri, serta dilarangnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Edukasi ini merupakan hal yang penting ditengah maraknya kasus perceraian serta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan hal-hal negatif diantaranya dampak psikologis terhadap anak.

Selain forum dan kelas-kelas tersebut, ada pula program sosialisai dan edukasi terhadap tokoh agama. Tokoh agama dinilai memiliki peran yang sangat penting dimana mereka memiliki forum pengajian dengan anggota yang banyak. Perlunya menyamakan persepsi dengan tokoh agama merupakan salah satu langkah yang penting dan sangat tepat, mengingat pernikahan siri dapat tetap terlaksana jika tokoh agama tetap mau mendukung ataupun menikahkan anak yang masih dibawah usia pernikahan.

Pemilihan taktik sebenarnya hanya didasarkan pada dua fungsi yaitu fungsi menghubungkan dan fungsi meyakinkan. Supaya taktik yang dipilih dapat menjalankan fungsi menghubungkan dan meyakinkan, maka harus dilihat tingkat ketepatan dan daya penampaiannya (Venus 2012:153)

6. Menentukan *Messenger*

Untuk melakukan komunikasi persuasif pada kampanye, selain menentukan pesan yang akan disampaikan dan sasaran (khalayak), terdapat satu hal lagi yang menentukan komunikasi persuasif yaitu sumber (komunikator). Suciati (2015:246) juga memaparkan bahwa seorang komunikator dalam hal ini harus kredibel. Ia harus memiliki syarat keterpercayaan (*truthworthiness*) dari penerima pesan, kepakaran (*expertness*), disukai oleh penerima pesan, memiliki kesamaan dengan penerima pesan, serta memiliki beraneka sumber (*multiple sources*) dalam memperjelas isi pesan yang ingin disampaikan,

Hal ini pula yang dilakukan oleh tim kampanye pencegahan pernikahan dini, perceraian, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi dalam menyampaikan pesan persuasif kampanye. Tim kampanye memilih Camat, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, Kapolsek, serta LSM Rifka Annisa yang memang memiliki kredibilitas di bidangnya masing-masing. Camat akan menyampaikan pesan kampanye dari segi sosial budaya dan aspek ekonomi di Saptosari, kemudian Kepala KUA akan menjelaskan mengenai pernikahan yang baik, kepala Puskesmas menjelaskan soal kesehatan reproduksi serta kehamilan yang baik, Kapolsek menjelaskan dari segi hukum hamil dibawah umur serta ancaman pidana, dan LSM Rifka Annisa yang membuat program sosialisasi yang tepat pada masyarakat dan menjelaskan perihal kekerasan dalam rumah tangga serta komunikasi yang baik dalam keluarga.

Selain mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini, perceraian, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui para komunikator tersebut, tim kampanye juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang nantinya juga akan menjadi komunikator selanjutnya untuk memperluas atau menyebarkan pesan kampanye. Komunikator yang memiliki kredibilitas dan dapat mempersuasikan masyarakat, dapat dikategorikan pula sebagai *opinion leader*. Menurut Nurudin (2007:160-161) *opinion leader* adalah orang yang

mempunyai keunggulan dari masyarakat kebanyakan. Sudah sepantasnya jika mereka mempunyai karakteristik yang membedakan dirinya dengan yang lain.

Sosialisasi dan edukasi kepada *opinion leader* dilakukan karena mereka merupakan orang-orang yang paling dekat dengan masyarakat dalam kesehariannya serta menjadi panutan. Mereka yang diedukasi diantaranya adalah Kepala Desa, Pak Dukuh dan Bu Dukuh, Para Remaja, hingga Tokoh Agama. Setelah diedukasi, mereka dapat menyebarkan pesan kampanye kepada masyarakat sekitar seperti saat rapat RT, PKK, atau acara lainnya.

7. Sumber daya

Dalam melaksanakan program kampanye ini, tim kampanye dibentuk oleh Camat Saptosari dengan melibatkan mereka memang terlibat saat mendiskusikan masalah pernikahan dini. Panitia kampanye sendiri terdiri dari Camat Saptosari, Kepala KUA, Sie.Kesejahteraan Sosial (dari kantor kecamatan), anggota (polsek, puskesmas), serta LSM Rifka Annisa. Pembentukan panitia ini merupakan komitmen bersama dan secara sukarela dalam melaksanakan kampanye guna mengatasi masalah pernikahan dini di Saptosari. Hal ini dikarenakan Pemerintah Saptosari tidak memiliki dana khusus untuk melaksanakan kampanye. Dana terbatas yang diperoleh hanyalah sumbangan dari pengajian rutin bulanan serta bantuan dari LSM Rifka Annisa.

8. Saluran Kampanye

Kampanye ini dilakukan dengan komunikasi tatap muka dengan *messenger* tertentu untuk menyampaikan pesan kampanye ke masyarakat. Pemilihan penyampaian pesan kampanye melalui tatap muka atau secara langsung merupakan cara yang efektif. Menurut Setyodarmojo (2003:84) dalam *mass-media communication* atau komunikasi secara sekunder itu kebanyakan akan mendapat gangguan (*noise*), sehingga “*commonness*”, yaitu hasil dari komunikasi itu lebih lambat dibandingkan dengan “*face-to-face communication*” atau komunikasi secara primer. Oleh karena itu komunikasi yang efektif dalam *Public Relations* adalah komunikasi dua arah dengan tatap-muka secara langsung,

terutama sekali oleh karena tujuan *Public Relations* itu bersangkutan-paut dengan sikap (*attitude*) manusia yang memerlukan penanganan dengan teknik, cara dan seni (*art*) yang sesuai dengan kondisi yang ada, serta reaksi, respon atau umpan balik (*feedback*) seketika itu.

9. Evaluasi

Ostergaard (2002) dalam Venus (2012:212-213) mengatakan hal itu bergantung pada tujuan evaluasi itu sendiri. Secara umum, evaluasi kampanye dapat dikategorisasikan dalam empat level atau tingkatan sebagai berikut : tingkatan kampanye (*campaign level*), tingkatan sikap (*attitude level*), tingkatan perilaku (*behavior level*), dan tingkatan masalah (*problem level*). Dikarenakan tujuan dari kampanye ini adalah mengubah perilaku masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini, maka evaluasi yang sesuai adalah tingkatan perilaku.

Pada tahapan evaluasi ini, tim kampanye juga melakukan evaluasi secara bertahap atau monitoring program kampanye dengan melihat data yang ada pernikahan di KUA serta data kesehatan ibu dan bayi Puskesmas. Hal tersebut dirasa paling mudah dan efektif karena panitia kampanye sendiri berada pada lingkup pekerjaan tersebut sehingga lebih mudah memantau. Evaluasi perubahan perilaku sendiri bukanlah evaluasi yang dapat diukur, namun lebih melihat kepada masyarakat secara langsung. Untuk melihat perubahan perilaku masyarakat tentu pemerintah tidak dapat melakukannya secara langsung, namun lebih mengarah kepada sistem koordinasi melalui Dukuh, Kepala Desa, hingga ke Camat.

Kesimpulan

Pemerintah Kecamatan Saptosari melakukan beberapa tahapan dalam kampanye yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kampanye. Strategi kampanye yang dilakukan telah berhasil dan efektif dilihat dari data mengenai turunnya angka pernikahan dini, perceraian, serta kematian ibu dan bayi. Keberhasilan ini dapat diperoleh dikarenakan berbagai taktik yang dilakukan dalam kampanye diantaranya deklarasi, sosialisasi dan edukasi dalam berbagai bentuk mulai dari edukasi di

sekolah, dibentuknya kelas remaja, kelas ayah dan ibu, hingga sosialisasi dengan tokoh agama. Selain itu terdapat pula komitmen yang telah disepakati bersama yaitu jika terdapat anak dibawah umur yang ingin menikah, maka lurah tidak akan memberikan surat rekomendasi pernikahan, sehingga langkah mereka yang ingin menikah dapat dihentikan dari awal.

Meskipun kampanye yang dilakukan telah efektif, dalam pelaksanaan kampanye ini alokasi dana hanya diperoleh melalui sumbangan atau iuran pengajian bulanan yang diadakan di Kecamatan. Selain itu dana juga diperoleh melalui kerjasama dengan LSM Rifka Annisa. Kekurangan dalam hal alokasi dana untuk kampanye menjadikan program kampanye tidak dapat dilakukan secara besar dan maksimal, seperti halnya penggunaan media massa untuk kampanye.

Pada tahapan evaluasi, tim kampanye melakukan evaluasi secara bertahap yaitu dengan memantau data pernikahan yang ada di KUA serta data kesehatan ibu dan bayi yang ada di Puskesmas. Pemantauan data tersebut dapat dilakukan secara rutin karena panitia kampanye sendiri berasal dari ruang lingkup pekerjaan tersebut, sehingga dapat lebih mudah dilakukan. Namun, evaluasi langsung dengan melibatkan masyarakat masih belum dilaksanakan. Hal ini membuat tim kampanye belum mengetahui secara langsung kasus di masyarakat seperti terjadinya pernikahan siri. Meskipun pencegahan pernikahan dini telah berhasil dilakukan dengan menyadarkan masyarakat dari sudut pandang budaya, namun pernikahan dini masih dapat terjadi jika masalah pergaulan bebas tidak diatasi, karena masalah tersebut selalu ada setiap tahunnya sehingga diperlukan komitmen bersama untuk memantau pergaulan para remaja.

Daftar Pustaka

Buku :

Cutlip, Scoot M., Allen H. Center, dan Glen M. Broom. 2011. *Effective Public Relations*, Edisi Kesembilan. Jakarta: Kencana.

Gregory, Anne. 2004. *Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public Relations*. Erlangga : Jakarta

Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Kencana : Jakarta

Nurudin. 2004. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Setyodarmodjo, Soekarno. 2003. *Public Reations : Pengertian Fungsi dan Peranannya*. Papyrus : Surabaya

Suciati. 2017. *Teori Komunikasi dalam Multi Perspektif*. Buku Litera : Yogyakarta

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung

Venus, A. 2012. *Manajemen Kampanye*. Simbiosis Rekatama Media: Bandung

Jurnal:

<https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/607/542> (diakses pada 29 September 2017)

Website:

(<http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa/4KZVgwpK-indonesia-kamboja-penyumbang-tertinggi-pernikahan-dini> diakses pada 26 Oktober 2017).